DRAF PERATURAN BUPATI

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR .....TAHUN .....**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur melalui Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.
- Mengingat : (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
- (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5305);

- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

8. Program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian penghargaan pelaksanaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan program/kegiatan TJSL dan PKBL di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSL dan PKBL bertujuan untuk :
  - a. memberikan motivasi dan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSL dan PKBL
  - b. Membangun dan meningkatkan citra perusahaan.
  - c. Memberikan rekomendasi umpan balik kepada perusahaan untuk menyempurnakan pengintegrasian pelaksanaan TJSL dan PKBL dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - d. Memberikan inspirasi dan contoh yang baik (*good practice*) kepada perusahaan lain dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Cakupan program;
- b. Tata cara penilaian;
- c. Prosedur;
- d. Tim Penilai; dan
- e. Pendanaan.

BAB III

CAKUPAN PROGRAM

Pasal 4

Cakupan Program penyelenggaraan TJSL dan PKBL meliputi bidang:

- a. sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):

- b. lingkungan, yaitu diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.
- c. kesehatan, yaitu diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pendidikan, yaitu diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. peningkatan daya beli, yaitu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yaitu diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- g. sarana dan prasarana keagamaan, dan
- h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSL dan PKBL, perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSL dan PKBL harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan, meningkatkan kualitas lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) Bentuk program dan kegiatan TJSL dan PKBL sinergi dengan program dan kegiatan unggulan/prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan TJSL dan PKBL perusahaan.
- (3) Program dan kegiatan TJSL dan PKBL perusahaan sudah berjalan paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua
Aspek Yang Dinilai

Pasal 6

Aspek yang dinilai dalam pemberian penghargaan program TJSL dan PKBL yaitu :

- a. Kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TJSL dan PKBL.
- b. Pelaksanaan meliputi :
  1. Perencanaan program dan kegiatan TJSL dan PKBL;
  2. Alokasi dana/anggaran TJSL dan PKBL;
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan TJSL dan PKBL;
  4. Dampak bagi penerima manfaat atas program dan kegiatan TJSL dan PKBL dan
  5. Keberlanjutan program dan kegiatan TJSL dan PKBL bagi penerima manfaat.

BAB V

PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal membentuk tim sekretariat penghargaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal membentuk Tim Penilai.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal mengeluarkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk terkait rencana pelaksanaan penilaian penghargaan TJSL dan PKBL termasuk penominasian atau pengusulan penghargaan.
- (4) Perusahaan yang menyelenggarakan TJSL dan PKBL mendaftarkan program TJSL dan PKBL kepada sekretariat penghargaan sesuai kategori penghargaan dengan melengkapi dokumen administrasi dan bukti pendukung lainnya melalui hipertaut (link) pendaftaran;
- (5) Sekretariat penghargaan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen administrasi dan bukti pendukung lainnya kepada Tim Penilai.
- (6) Tim sekretariat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dan Tim Penilai terkait tahapan dan proses pelaksanaan penilaian penghargaan.

Pasal 8

- (1) Kategori Penghargaan digolongkan kedalam bentuk :
  - a. Societies Award;
  - b. Economic Award; dan
  - c. Biosphere Award.

- (2) Societies Award sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan bagi perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Manusia guna meningkatkan taraf hidup yang berkualitas..
- (3) Economic Award sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan bagi perusahaan yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan riil, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- (4) Biosphere Award sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan bagi perusahaan yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan hidup manusia, membantu lingkungan, mengurangi konsumsi energi, dan mendidik masyarakat/meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan dan kebencanaan.

Pasal 9

- (1) Peringkat penghargaan didasarkan hasil penilaian oleh tim dalam 3 (tiga) peringkat penghargaan (awards) untuk program TJSL dan PKBL yaitu:
  - a. Peringkat pertama disebut Platinum Awards,
  - b. Peringkat kedua disebut Gold Awards,
  - c. Peringkat ketiga disebut Silver Awards.
- (2) Perusahaan penerima penghargaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 10

Tanda penghargaan diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Piala; dan/atau
- c. Bentuk lainnya

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 11, mempunyai tugas:

- a. Bersama tim sekretariat penghargaan menyusun agenda kegiatan pelaksanaan penilaian penghargaan;
- b. Memeriksa/meneliti dokumen administrasi dan bukti pendukung lainnya;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data/informasi melalui kunjungan lapangan (visitasi);
- d. Memberikan penilaian program dan kegiatan;

- e. Menyampaikan hasil penilaian kepada sekretariat penghargaan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pemberian penghargaan program TJSL dan PKBL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong,
Pada Tanggal 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR ...